

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Ketidakmerataan dalam berbagai sektor di Indonesia, yaitu antar sektor kepemilikan, faktor produksi maupun antar wilayah sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan mengalami kekurangan bagi pengembangan SDM.

Dasar dari pada ekonomi Indonesia adalah sosialisme, ekonomi Indonesia adalah ekonomi sosialis Indonesia. Yaitu ekonomi yang berorientasi kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa* (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme); *Kemanusiaan yang adil dan beradab* (tidak mengenal pemerasan/eksploitasi manusia); *Persatuan*(kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi); *Kerakyatan*(mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta *Keadilan sosial*(persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang).¹Keadilan adalah hal utama yang harus didahulukan bahwa orang berlaku adil tanpa menunggu makmur. Dengan demikian ekonomi sosialis Indonesia adalah *Ekonomi Pancasila*.²

¹ Abdul Madjid, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm 5.

² Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini. Jika Pancasila adalah khas Indonesia,

Dalam perkembangannya, pembangunan terjadi hanya memperhatikan sebagian rakyat Indonesia. Kota-kota besar mengalami perkembangan cukup pesat seperti tingginya pertumbuhan penduduk, pesatnya perluasan kota, dan tingginya tingkat urbanisasi. Perubahan tersebut mengubah pola konsumsi, gaya hidup dan perilaku sosial menuju perbaikan kesejahteraan. Proses perkembangan kota dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan yang penting adalah keterbatasan kemampuan kota untuk menyediakan peluang kerja bagi masyarakat yang terus bertambah dengan pesat.

Pertengahan tahun 60-an merupakan masa yang suram bagi perekonomian bangsa Indonesia. Tingkat produksi dan investasi berbagai sektor utama menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950.³ Pada masa Orde Lama, perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami kemunduran dan kemerosotan, sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bidang moneter misalnya, terjadi pemotongan nilai mata uang yang menyisakan nilai sepersepuluh dari nilai tukar saat itu. Peredaran uang yang makin meningkat disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi.⁴ Hal tersebut memperparah perekonomian negara yang mengakibatkan keresahan sosial di berbagai tempat.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kemiskinan adalah pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat

maka Ekonomi Pancasila adalah ekonomi khas Indonesia. Lihat keterangan lengkapnya, *Ibid.*, hlm 1-2.

³ Anne Both & Peter McCawley, *Ekonomi Orde Baru*, (Malaysia:Oxford University Press, 1981), hlm 1.

⁴ R.Z. Leirissa, *et.al.*, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1996), hlm 99.

produktivitas yang rendah. Situasi tersebut mendorong penduduk desa datang ke kota besar seperti ke Surabaya. Mereka mengadu nasib ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur sekaligus pusat perdagangan dan pemerintahan, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan baru.

Dalam perkembangannya, para pendatang baru di kota Surabaya semakin bertambah dan tidak terkendali. Dalam waktu singkat, kota Surabaya berkembang liar dan semakin bertambah padat. Terbukti dengan tumbuhnya perkampungan-perkampungan baru di daerah-daerah pinggiran kota Surabaya.⁵Keterampilan dan pendidikan yang sangat rendah, mengakibatkan sebagian dari mereka tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan berarti akan menambah barisan pengangguran yang telah cukup panjang. Mereka yang tidak memperoleh pekerjaan akhirnya memilih untuk tetap tinggal dan menjaditunawisma. Mereka segan untuk pulang kembali ke kampung, karena malu untuk kembali kepada sanak saudara, mereka juga sudah tidak mempunyai tanah lagi untuk bercocok tanam.

Terjadinya ketidakseimbangan antara kesempatan kerja dengan tenaga kerja yang mencari pekerjaan bukan hanya disebabkan oleh tiadanya lapangan pekerjaan, tetapi juga terjadinya ketidaksuaian antara keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dengan keahlian/keterampilan yang tersedia. Namun demikian jumlah pengangguran yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja yang jauh lebih besar.

⁵ Ilhami, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm 15.

Para tuna wisma ini yang sudah umum terjadi di Indonesia atau Surabaya. Umumnya di kota Surabaya mereka sering disebut dengan sebutan “*bambungan*” dan mereka sangat mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Masalah ketidakpunyaan tempat tinggal sangat erat hubungannya dengan daerah – daerahpedalaman di wilayah Jawa Timur, dimana jumlah pengangguran sangat besar dan kondisi pertanian yang memprihatinkan. Tingkat kelahiran pada kelompok masyarakat berpenghasilan kecil sangat tinggi jauh melebihi kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (kaya).

Akibat dari bertambahnya para tunawisma di kota Surabaya, timbul masalah baru yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah merancang peraturan-peraturan untuk menyelesaikan masalah gelandangan di kota Surabaya. Dari latar belakang tersebut menarik untuk di kupas lebih lanjut, seperti apakah kehidupan para tunawisma dan bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kehidupan para tunawisma dan tunakarya yang ada di kota Surabaya pada tahun 1960-an?
2. Bagaimana Penanggulangan pemerintah kota Surabaya dalam mengatasi masalah pengangguran dan para tunawisma di kota Surabaya pada tahun 1950-1974?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi tentang Tunawisma kota Surabaya, bertujuan untuk yang *pertama*, yaitu untuk memberikan penjelasan tentang keadaan sosial dan ekonomi para tunawisma kota Surabaya. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah dalam penanganan para tunawisma yang ada di kota Surabaya.

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan kepada kita mengenai kehidupan para tunawisma di kota Surabaya. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan rangsangan agar diadakan penelitian lebih lanjut atau menjadi bahan referensi bagi peneliti lain, karena peneliti menyadari tidak ada sesuatu yang sempurna sehingga penelitian ini terbuka untuk diuji dan dikaji kembali. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi akademik tentang kehidupan sosial orang-orang pinggiran kota Surabaya khususnya para tunawisma. Manfaat historiografi dalam karya ilmiah ini adalah untuk menambah khasanah sejarah perkotaan, sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Sejarah yang ingin menulis sejarah permasalahan kota yang ada di kota Surabaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai sebuah penelitian sejarah, maka penulisan sejarah harus dibatasi oleh lingkup spasial dan temporal agar pengkajian terhadap permasalahan yang akan diungkap lebih terfokus. Periodisasi diperlukan untuk membuat waktu yang terus bergerak tanpa henti menjadi dapat dipahami (*intelligible*) dengan membaginya dalam unit-unit waktu, dalam babak-babak, maupun dalam periode-periode. Periodisasi adalah konsep sejarawan semata-mata, suatu produk mental

yang hanya ada dalam pikiran sejarawan, sebuah *ideal type*. Realitas sejarah itu sesungguhnya terus berjalan tanpa henti, pembabakan waktu hanyalah sebuah konsep yang dibuat oleh para sejarawan untuk lebih mempermudah dalam menentukan sebuah lingkup sejarah.⁶

Dalam penelitian ini diperlukan suatu arahan dan batasan yang jelas. Untuk itu, maka penulis berusaha mengkaji beberapa hal diantaranya permasalahan yang terjadi pada masa itu, serta batasan spasial dan temporal.

Batasan spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyangkut batasan wilayah atau tempat, yang dalam kajian ini menitikberatkan pada wilayah Kota Surabaya khususnya. Adapun alasan pemilihan kota Surabaya sebagai batasan spasial, karena kota Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup pesat. Proses perkembangan kota Surabaya tentu tidak luput dari berbagai permasalahan, baik masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Batasan temporal yang dikaji adalah mulai masa pada tahun 1950 sampaitahun 1974. Alasan memilih sebagai batasan awal penulisan ini pada tahun 1950 karena pada masa itu di Indonesia dan kota-kota lainnya mengalami perpindahan dari desa ke kota atau terjadi urbanisasi. Sebagai batasan akhir dari penulisan ini adalah tahun 1974, dimana masa itu Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan munculnya kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan untuk mengendalikan para tunawisma dan tunakarya dengan menyediakan penampungan-penampungan bagi para tunawisama.

⁶ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 10-20.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa buku yang mengkaji tentang permasalahan munculnya para tunawisma, antara lain: Buku *Kemiskinan di Perkotaa* karya Parsudi Suparlan, berisi tulisan-tulisan lepas yang ingin menunjukkan bagaimana kompleksitas masalah kemiskinan diperkotaan dengan aspek-aspeknya yang beragam dan bagaimana para ahli sosial melihat masalah kemiskinandengan kerangka-kerangka pendekatannya. Keterkaitan dengan penulisan ini adalah tentang permasalahan kemiskinan yang menimbulkan pengangguran.

Buku *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota* karangan M. Cholil, menjelaskan tentang kehidupan masyarakat kota dan desa, baik karena perpindahan penduduknya maupun karena kemajuan pembangunannya. Membahas tentang masalah yang timbul akibat dari urbanisasi dan cara Pemerintah dalam mengatasinya.⁷ Dalam buku ini sedikit memberikan gambaran tentang terjadinya perpindahan dari desa ke kota yang berdampak terjadinya seseorang tidak mempunyai tempat tinggal.

Buku *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia* karangan Ilhami mengupas mengenai pelaksanaan pembangunan perkotaan khususnya pada masa sebelum Repelita I sampai Repelita I berlangsung. Kedudukan, fungsi, dan peranan kota yang sangat penting menuntut sistem pengelolaan perkotaan seperti *planning, organizing, actuating dan controlling* yang lebih tepat guna, juga penting sekali penataan aspek manusianya yang akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan perkotaan tersebut antara lain para aparat pemerintah,

⁷ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm 127-130.

para cendekiawan dan warga masyarakat lainnya. Buku ini juga memberikan sumbangan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang penanganan para tunawisma.

Buku karangan Eko Budihardjoyang berjudul *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, membahas mengenai masalah pemukiman di kota-kota besar.⁸ Penulis dapat melihat munculnya berbagai masalah baru dalam proses pengadaan rumah, terutama di kota-kota besar yang pesat perkembangannya, cepat laju pertumbuhan penduduk yang sangat heterogen masyarakatnya seperti di Surabaya.

Buku berjudul *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesi* karangan Mubyarto, membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Khususnya sistem ekonomi pada masa Demokrasi Liberal sampai dengan Pelita I.⁹ Buku ini memberikan sumbangan tentang keadaan perekonomian pada tahun 1950-1974.

F. Kerangka Konseptual

Para tunawisma dan tunakarya adalah suatu realitas sosial yang keberadaannya selalu ada dan tidak bisa dipisahkan dengan masalah perkotaan. Hampir selalu para tunawisma terlihat di seluruh kota yang ada di Indonesia.

Tunawisma adalah lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam strata masyarakat kota. Tunawisma dilukiskan sebagai orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan layak, yang menyebabkan mereka harus makan dan tinggal sembarang tempat. Menurut

⁸ Eko Budihardjo *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm vi.

⁹ Mubyarto, *op.cit.*, hlm 6.

W.J.S. Poerwadarminto dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengertian dari tunawisma adalah *orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau rumah serta tak menentu pula pekerjaannya*.¹⁰

Perkampungan kumuh dan hunian liar (*squatter*) merupakan kenyataan yang sering ditemui di tiap kota besar di negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Munculnya daerah itu seringkali dikaitkan dengan pesatnya arus migrasi desa-kota yang tidak diikuti dengan penambahan fasilitas perkotaan. Munculnya masalah sosial dan kantong-kantong orang miskin di kota sebagai akibat "*urbanisasi semu*" atau proses urbanisasi yang kebanyakan terjadi di dunia ketiga tidak berkaitan dengan perkembangan ekonomi, kemudian menimbulkan kelompok rakyat jelata yang merupakan massa miskin di kota.

Kota-kota di dunia ketiga mengalami apa yang disebut "*urbanisasi berlebih*", yaitu suatu keadaan dimana kota-kota tidak mampu menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai kepada sebagian besar penduduk. Menurut keadaan itu terjadi karena adanya urban bias, yaitu kebijakan yang lebih mengutamakan pengembangan perkotaan sehingga penduduk luar kota banyak yang terangsang untuk mencari nafkah ke kota, sedangkan pemerintah kota sudah tidak mampu menambah fasilitas perkotaan.¹¹

Fasilitas perkotaan yang dirasakan mengundang masalah, yaitu tanah dan perumahan. Selain itu, masalah yang dianggap cukup serius dan menjadi ciri kota-

¹⁰ Entang Sastraatmadja, *Dampak Sosial Pembangunan : Minggu Merdeka 9 Januari 1983*, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm 5.

¹¹ Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hlm 123.

kota di dunia ketiga ialah masalah kesempatan kerja, kota mulai tidak mampu menyediakan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup warganya. Kebanyakan penduduk, baik pendatang desa-kota maupun penduduk kota, yang baru masuk angkatan kerja menemui kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan.

Untuk memenuhi tuntutan hidup, akhirnya mereka memilih pekerjaan seadanya walaupun tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki atau mereka berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan kehidupan kota. Munculnya lapangan pekerjaan baru bersifat sementara, tidak menentu dalam penghasilan dan jam kerja. Penghasilan yang didapatkan diperkirakan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari. Dengan demikian kemungkinan membeli tanah dan memiliki rumah jauh dari jangkauan mereka. Akibatnya, kebanyakan dari mereka mendirikan gubug-gubug sebagai tempat tinggal di sekitar pusat kota yang dekat dengan tempat mencari nafkah.

Ada kecenderungan mereka mengelompok dan membentuk kerumunan tempat tinggal di tanah-tanah kosong di kota, seperti di pinggir rel kereta api, di kolong jembatan, dan tanah-tanah negara yang belum digunakan, atau daerah yang tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal.¹² Kerumunan tempat tinggal seperti itu termasuk kategori daerah hunian liar (*squatters*).¹³

Secara fisik hunian liar ditandai dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas seperti penerangan listrik, pembuangan air, sanitasi, dan pelayanan umum. Dipandang dari aspek sosial masyarakat, daerah hunian liar mempunyai ciri-ciri:

¹² Yaitu daerah kanan dan kiri sekitar 25 – 50 meter dari jalan kereta api, daerah banjar tepi sungai.

¹³ Tadjuddin Noer Effendi, *op.cit.*, hlm 124.

menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan kepada diri sendiri, dan kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerjasama untuk menanggulangi kesulitan bersama, dan tetap berusaha mengorganisasikan kehidupan dalam rangka menyelamatkan rumah dan masyarakat mereka. Adanya sikap informal dan hubungan tetangga yang baik dapat mendukung serta memperingan beban orang-orang itu.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini yang penulis lakukan menggunakan karakteristik diskriptif naratif, tahapan dalam melakukan penulisan terdiri dari lima bagian:

Langkah *pertama*, Pemilihan topik yaitu pemilihan topik yang akan di tulis dan permasalahan yang akan di bahas. Penulisan memilih topik tentang keadaan sosial dan ekonomi di kota Surabaya, kehidupan para tunawisma dan kebijakan pemerintah tentang penanganan para tunawisma di kota Surabaya.

Langkah *kedua*, Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah.¹⁴ Gazalba menjelaskan bahwa heuristik merupakan proses mencari bahan atau menyelidiki sejarah untuk mendapatkan bahan.¹⁵ Sumber yang ditemukan oleh penulis kemudian diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber-sumber asli yakni bukti yang sejaman dengan suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan sumber data sekunder yaitu apa yang ditulis oleh sejarawan sekarang ataupun sebelumnya berdasarkan

¹⁴Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 99.

¹⁵Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1981), hlm. 114.

sumber pertama.¹⁶ Penulis kemudian melakukan penelusuran sumber-sumber penulisan ini, dilakukan di beberapa tempat diantaranya adalah di Badan Arsip Propinsi Jawa Timur yang dimana terdapat sumber-sumber primer yang berkaitan dengan para tunawisma. Selain itu, juga melakukan pencarian sumber-sumber di Badan Arsip Kota Surabaya. Di Perpustakaan Pusat Kampus B Universitas Airlangga juga membantu menemukan sumber-sumber sekunder yaitu berupa buku-buku. Dan mencari sumber-sumber sekunder mencari di Perpustakaan DHD, Perpustakaan Medayu Agung (kossagraha) dan Badan Perpustakaan Daerah Jawa timur.

Langkah *ketiga*, Verifikasi sumber adalah pengujian mengenai kebenaran dan ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah, verifikasi sumber dikenal dengan dua cara, yaitu kritik internal dan eksternal.¹⁷

Kritik Internal adalah kritik terhadap aspek-aspek dalam dari sesuatu sumber atau teks, mempertanyakan kredibilitas dan atau reliabilitas isi sumber atau teks. Penulis berusaha meyakinkan bahwa data yang diperoleh adalah suatu kebenaran.¹⁸ Sumber penelitian ini beberapa diantaranya merupakan arsip-arsip yang berkaitan dengan tunawisma. Untuk melakukan hal tersebut, penulis melakukan perbandingan (*kroscek*) dengan sumber-sumber lain seperti arsip-arsip atau majalah atau buku-buku terbitan resmi pemerintah. Penulis juga melakukannya dengan mencocokkan dengan berbagai ilmu seperti Museologi untuk melihat keaslian dari sumber yang digunakan.

¹⁶Sjamsuddin, *op cit.*, hlm. 101.

¹⁷*Ibid*, hlm. 104.

¹⁸ Kuntowijoyo, *op cit.*, hlm. 102.

Kritik eksternal memiliki fungsi yaitu memeriksa sumber-sumber sejarah dan menegakkan sedapat mungkin otentitas dan integritas dari sumber tersebut. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang atau pada waktu tersebut dan kesaksian yang diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa adanya suatu tambahan atau pengurangan yang substansial. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui keaslian pada sumber data yang telah terkumpul. Kritik eksternal ini diberlakukan pada semua sumber sejarah, baik tertulis maupun lisan. Pada tahap metode ini, penulis melakukan kritik ekstern terhadap sumber untuk menentukan sifat atau jenis sumber (asli, turunan, atau palsu) dan keotentikan suatu sumber. Arsip dan data-data sejarah yang lainnya bagaikan emas. Tentu untuk menemukannya penulis membutuhkan banyak dana dan waktu serta perjuangan. Oleh karena itu ketika ada rekan yang kebetulan menemukan arsip dan memberikannya kepada penulis merupakan hadiah yang tidak ternilai harganya. Jadi penulis tetap menggunakan arsip tersebut sebagai sumber primer dan melakukan pengkritikan terlebih dahulu agar sumber yang didapat memang sumber yang otentik.

Langkah *keempat*, Interpretasi adalah penafsiran, sering disebut sebagai biang subyektivitas. Tanpa adanya penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Penulis akan tetap berpijak pada fakta yang ada di lapangan yakni yang telah mengalami verifikasi. Dalam interpretasi tidak menutup kemungkinan adanya subjektivitas sejarawan, sehingga subjektivitas penulis sejarah itu diakui tetapi dihindari. Dalam proses ini menyajikan sumber-sumber yang telah didapat dan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui kritik sumber, interpretasi data, dalam sebuah tulisan sejarah yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan

sejarah. Pada tahap ini penulis menggabungkan fakta-fakta yang telah dikritik sebelumnya menjadi suatu penjelasan peristiwa yang diinterpretasikan dengan baik sebelum memulai tahap penulisan sejarah. Seperti menginterpretasikan arsip-arsip yang di dapat dari kantor Arsip Kota Surabaya. Banyak sumber arsip yang berkaitan dengan penulisan ini, namun penulis berusaha menafsirkan dan menggabungkan dalam satu kesatuan yang utuh. Sehingga bisa menjelaskan apa yang ada dalam penulisan ini.

Langkah *kelima*, Historiografi adalah kegiatan intelektual yang dilakukan oleh sejarawan untuk membuat deskripsi, narasi, analisis kritis, serta sintesis dari fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi, teori, hipotesis sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang utuh.¹⁹ Aspek kronologis sangat penting dalam historiografi. Aspek kronologis inilah yang membedakan kajian sejarah dengan kajian lainnya. Dalam penulisan ini membahas tentang kehidupan para tunawisma yang ada di kota Surabaya, penulis berusaha memaparkan fakta-fakta secara kronologis dan sistematis yang beracuan pada sumber-sumber yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisan tentang para tunawisma di Surabaya pada tahun 1950 sampai 1974 merujuk pada sistematika permasalahan yang terbagi dalam 4 bab.

¹⁹ Sjamsuddin, *op cit.*, hlm. 177.

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kehidupan para tunawisma di Kota Surabaya, pada masa Demokrasi Liberal membahas tentang terjadinya pengungsian penduduk Surabaya akibat pembumihangusan, keadaan kota Surabaya secara ekonomi. Pada masa Orde Lama membahas mengenai kehidupan sosial para tunawisma di Surabaya dan tempat penampungan untuk para tunawisma.

BAB III Kebijakan Pemerintah pada masa Orde Baru, Surabaya dinyatakan tertutup bagi para tunawisma sesuai dengan Surat Pernyataan Walikota Surabaya, partisipasi masyarakat Surabaya, dan juga transmigrasi.

BAB IV Sebagai penutup berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian.